

# Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Merespon Kebijakan *Rebalance* Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik tahun 2011

Irdatul Hamidah

Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional  
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur  
e-mail: [irdatulhamidah@gmail.com](mailto:irdatulhamidah@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research discusses about the kind and nature of China's foreign policy post US rebalance policy in Asia-Pacific in 2011. The background of this research is the exist of US rebalance policy in Asia Pacific which is considered by China as a US move to stem the power and influence of China in the Asia Pacific region. Those became the main platform issues examined in this study, namely how is the foreign policy of China in responding to US rebalance policy in Asia Pacific. Those problems will be analyzed and explained by using defensive realism theory as a basis of argument. From the theoretical approach that given, it can be deduced that China's foreign policy is defensive that is implemented with peripheral diplomacy policy and increase national security and defense through the formulation of defensive strategy.*

**Keywords:** Foreign policy, Rebalance, Defensive realism, Peripheral diplomacy, Defense strategy

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan sifat kebijakan luar negeri Tiongkok pasca adanya kebijakan *rebalance* Amerika Serikat di Asia Pasifik tahun 2011. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik yang dianggap Tiongkok sebagai langkah AS untuk membendung kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut kemudian menjadi pijakan utama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode eksplanatif dengan menjadikan teori *defensive realism* sebagai dasar argumen. Dari pendekatan teoritik yang diberikan, dapat ditarik jawaban sementara bahwa kebijakan Tiongkok adalah bersifat *defensive* yang diimplementasikan dengan kebijakan *peripheral diplomacy* dan peningkatan sistem keamanan dan pertahanan melalui perumusan strategi pertahanan yang bersifat *defensive*.

**Kata Kunci:** Kebijakan luar negeri, Rebalance, Defensive realism, Peripheral diplomacy, Strategi pertahanan

Sejak abad ke 21, Tiongkok tumbuh menjadi negara berkekuatan besar di Asia Timur yang diprediksi akan menggeser dan menggantikan dominasi Amerika Serikat (AS) di dunia. Niall Ferguson, seorang ahli sejarah menyatakan bahwa akan terjadi *global shift* atau pergeseran global yakni berakhirnya kekuatan barat dan adanya reorientasi dunia oleh kekuatan timur yang dikenal dengan istilah "*New World Order*" atau *Asian-Centered World* sesuai dengan pendapat Paul Kennedy dan Robert Gilpin bahwa dunia politik ditandai dengan rangkaian kebangkitan kekuatan suatu negara untuk mengorganisasikan sistem internasional (Ikanberry).

Kebangkitan Tiongkok tidak terlepas dari peningkatan kekuatan ekonominya sebagai hasil dari suksesnya kebijakan "*reform and openness*" pada akhir 1970-an. Tiongkok menjadi salah satu pusat manufaktur utama di dunia dan mengkonsumsi kira-kira sepertiga dari pasokan global besi, baja, dan batu bara. cadangan devisa yang dimiliki Tiongkok sebesar lebih dari 1 triliun dollar pada akhir tahun 2006 (Ikanberry). Produk domestik bruto (PDB) Tiongkok meningkat menjadi 39,5 triliun yuan atau setara dengan 5,98 triliun dollar Amerika Serikat di tahun 2010 atau 10,3 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (BBC).

Peningkatan ekonomi Tiongkok mempunyai peran yang signifikan di kawasan Asia Pasifik yang mana Tiongkok telah menjadi partner dagang yang sangat penting bagi negara-negara di Asia Timur. Ekspor negara-negara Asia Timur ke Tiongkok mengalami peningkatan sementara ekspor Tiongkok ke Asia timur mengalami penurunan. Tiongkok mengalami peningkatan ekspor ke Uni Eropa dan AS. Pertumbuhan perdagangan Tiongkok lebih dari dua kali lipat dari pertumbuhan perdagangan dunia dengan peningkatan ekspor antara tahun 1988 dan 2002 mengalami peningkatan dari 32 persen menjadi 55 persen (Haddad).

Dalam kondisi tersebut, semakin pentingnya Tiongkok secara ekonomi memberi ruang bagi Tiongkok untuk memperkuat posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan. Tiongkok mempunyai kesempatan yang besar untuk mempromosikan integrasi ekonomi di kawasan dan juga melibatkan diri dengan organisasi regional serta melakukan peningkatan militer sebagai simbol semakin kuatnya ekonomi Tiongkok (Szcudlik-Tatar). Anggaran pertahanan militer Tiongkok pada tahun 2010 dilaporkan meningkat sebesar 7.5 persen menjadi 532,1 miliar Yuan atau 77,9 miliar dollar AS dari 150 miliar dollar di tahun 2009 (Okezone).

Berdasarkan situasi tersebut, David Shambaugh berpendapat bahwa struktur kekuatan dan parameter interaksi yang telah menjadi ciri hubungan internasional di kawasan Asia di abad 21 sedang dipengaruhi secara fundamental, antara lain oleh meningkatnya kekuatan ekonomi, militer dan pengaruh politik Tiongkok, serta posisi diplomatik dan keterlibatan Tiongkok dalam institusi multilateral regional. Shambaugh berpendapat bahwa karakteristik hubungan negara-negara besar di Asia Pasifik di abad 21 diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa yang impresif (Shambaugh).

Pendapat dari Shambaugh tersebut kemudian terbukti dengan adanya kebijakan *rebalance* atau *Asian Pivot* Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik. Kebijakan *rebalance* merupakan kebijakan AS dalam berkomitmen untuk memprioritaskan kawasan Asia Pasifik setelah sebelumnya lebih fokus ke kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut pertama kali dikenalkan pada November 2011 lewat artikel yang ditulis oleh Hillary Clinton di jurnal *Foreign Policy* yang berjudul *America's Pacific Century*. Di dalam tulisannya Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai *Secretary of State* AS menyatakan bahwa AS akan berkomitmen untuk memprioritaskan Asia dalam politik luar negerinya yang mana telah disampaikan oleh Presiden Obama dalam pidatonya tentang *rebalance* di depan Parlemen Australia pada 17 November 2011, (White House).

*“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region—and home to more than half the global economy—the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority: creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress”. (The White House Office of The Press Secretary, 2011)*

Pidato Obama tersebut menyiratkan bahwa kebijakan *rebalance* AS merupakan implikasi dari kekuatan ekonomi Asia yang tumbuh dengan lebih cepat dari kekuatan ekonomi global. Sedangkan dalam pedoman strategi pertahanan AS yang dipublikasikan pada bulan Januari menunjukkan bahwa kebijakan *rebalance* di Asia Pasifik merupakan upaya AS untuk mempertahankan kepemimpinan AS di dunia global yang terancam digantikan oleh Tiongkok (US Gov).

AS menganggap bahwa peningkatan kekuatan Tiongkok merupakan sebuah potensi ancaman terhadap ekonomi dan keamanan AS. Oleh karenanya, peningkatan militer Tiongkok harus diimbangi dengan kekuatan yang lebih besar sebagai strategi untuk mencegah penyebab terjadinya perselisihan di kawasan (US Gov). Kelley Currie seorang analis senior pada lembaga penelitian Washington yang fokus pada keamanan Asia Timur

menyatakan bahwa kebijakan *rebalance* salah satunya ditujukan untuk menghambat peningkatan kekuatan Tiongkok dan implikasi dari kekhawatiran AS atas respon aliansi AS di kawasan terhadap kebangkitan Tiongkok (Currie).

Kebijakan *rebalance* AS umumnya dicirikan dengan fokusnya pada aspek militer. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut lebih bersifat multidimensi yang mana terdiri dari tiga elemen utama yakni elemen keamanan dan ekonomi serta diplomasi. Pada elemen keamanan, AS berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan militer dengan meningkatkan kapasitas militernya di Asia Pasifik sebesar 60 persen dari total kekuatan militer AS. Pada elemen ekonomi, AS menjadikan Asia Pasifik sebagai kepentingan vital dalam mengintegrasikan diri dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik melalui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang mana Tiongkok tidak termasuk didalamnya. Pada elemen diplomasi, AS berusaha untuk meningkatkan interaksi dengan semakin intensif melakukan kunjungan kenegaraan dan mengkampanyekan tentang tujuan AS yang meliputi implementasi keamanan dan stabilitas kawasan, ekonomi yang bebas dan terbuka, peningkatan hubungan politik dan nilai-nilai kemanusiaan serta akuntabilitas pemerintahan (Sutter)

Komitmen AS untuk mengimplementasikan kebijakan *rebalance* di Asia Pasifik mendapat perhatian khusus oleh banyak pihak. Bagi kebanyakan kekuatan regional di Asia Tenggara dan Asia Selatan, kebijakan tersebut menjadikan mereka berada pada posisi yang dilematis. Disatu sisi, banyak negara yang secara deklaratif atau privasi menyatakan bahwa mereka mendukung komitmen AS yang semakin kuat di kawasan Asia Pasifik. namun disisi lain, mereka juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok. Indonesia dan Thailand merupakan negara yang berkomitmen untuk tidak berpihak pada salah satu kekuatan dan memilih untuk menjalin hubungan baik dengan kedua negara (Sutter)

Sedangkan bagi masyarakat Tiongkok dan juga para pengamat politik, Kebijakan *rebalance* dinilai sebagai salah satu strategi AS dalam mempertahankan hegemoni di kawasan Asia Pasifik dan juga sebagai upaya untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik. Kebijakan *rebalance* tidak lain hanya dianggap sebagai upaya AS dalam menghambat kekuatan dan kontrol Tiongkok di kawasan dan juga sebagai pemicu instabilitas kawasan. Hal ini dapat dilihat dari opini publik Tiongkok dalam sebuah riset oleh "*Pew Research Center*" yang menyatakan bahwa para responden menganggap bahwa hubungan Tiongkok-AS sebagai musuh telah meningkat dari 8 persen di tahun 2010 menjadi 26 persen di tahun 2012 (Pew Research Center, 2012).

Hasil dari penelitian tersebut didapat dari publik umum, pegawai pemerintah, akademisi, dan juga para pemikir strategi serta berita nasional. Wang Jisi, seorang dekan di *Peking University School of International Studies* dan juga seorang ahli terkemuka dalam hubungan AS-Tiongkok berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok memandang bahwa tujuan akhir AS dalam urusan dunia adalah untuk mempertahankan hegemoni dan dominasinya. sebagai hasilnya, Washington akan berusaha untuk mencegah kekuatan yang muncul khususnya Tiongkok dari mencapai tujuan mereka dan meningkatkan status mereka (Liberthal)

Implikasi dari kebijakan *rebalance* telah menjadikan upaya Tiongkok dalam penguatan posisi diplomatik dan pengaruh Tiongkok melalui kerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik mengalami ujian dan tantangan. selain itu, dengan semakin intensifnya implementasi kebijakan *rebalance* AS, keamanan nasional Tiongkok menjadi terancam dengan semakin banyaknya kapasitas militer AS di Asia Pasifik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melemahnya kerjasama ASEAN+3 sebagai dampak dari terciptanya TPP (Terada). Selain itu, kebijakan *rebalance* AS dinilai sebagai pemicu eskalasi konflik di laut China selatan dengan adanya peningkatan kapasitas militer di Asia Pasifik (Emers).

Tiongkok telah tumbuh menjadi kekuatan besar di Asia yang diprediksi akan menggantikan dominasi AS di dunia global. Hal tersebut telah menjadikan Tiongkok mempunyai peluang

yang sangat besar untuk memperkuat posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan. Melihat kondisi tersebut, AS kemudian merumuskan kebijakan *rebalance* pada tahun 2011 yang dinilai sebagai langkah untuk membendung kekuatan Tiongkok.

Dengan adanya kebijakan *rebalance* AS, upaya penguatan diplomatik dan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik mengalami tantangan dan hambatan yang dibuktikan dengan melemahnya kerjasama ASEAN+3 sebagai dampak dari terciptanya TPP. Selain itu, peningkatan militer AS di Asia Pasifik dinilai dapat memicu terjadinya eskalasi konflik di laut China Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik tahun 2011?

### ***Defensive Realism Sebagai Landasan Terbentuknya Kebijakan Peripheral Diplomacy dan Increase National Security and Defense***

Teori *defensive realism* merupakan cabang dari teori realisme struktural yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz (Clifton). teori ini berkembang untuk menganalisa bagaimana kecenderungan sebuah negara dalam bertindak pada sistem yang anarki. Hal tersebut berdampak pada adanya usaha negara untuk memaksimalkan keamanan nasional sebagai upaya meminimalisasi kemungkinan adanya penaklukan dan penghancuran oleh negara lain (Waltz). Adapun yang menjadi fokus utama adalah kekuatan (*power*) yakni bagaimana negara memandang tentang arti dari *power* itu sendiri dengan menjadikannya sebagai alat atau sebagai tujuan (Feng and Zang Ruizhuang).

*Defensive realism* menganggap bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara adalah keamanan dan pertahanan diri yang mana *power* digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dan bukan tujuan itu sendiri. (Feng and Zang Ruizhuang). Dengan kata lain, *power* dianggap sebagai hal yang penting namun perhatian utama dari negara bukanlah untuk memaksimalkan *power* melainkan untuk mempertahankan posisi dalam sistem (Rudolf). Artinya, negara akan meningkatkan *power* dengan langkah apapun sebagai upaya dalam memelihara keamanan dan mempertahankan diri dalam sistem. Namun, *power* tersebut bukan digunakan sebagai alat atau modal untuk mengambil langkah agresif demi menghancurkan lawan atau menjadi negara hegemon.

*Defensive realism* menganggap kerjasama sebagai sebuah solusi atau bahkan strategi dalam mengurangi resiko sistem internasional yang anarki dan dapat memperkecil dampak *security dilemma*. Implikasinya, meskipun kemungkinan konflik tetap ada namun hal itu dapat diselesaikan secara damai karena pada dasarnya *defensive realism* juga mempercayai bahwa dalam permasalahan, baik itu bersifat politik maupun lainnya, jalur diskusi menjadi pilihan pertama meski kemungkinan terjadinya konflik tetap ada dan beberapa konflik tidak dapat mencapai kata damai (Glaser). Berdasarkan hal tersebut, negara cenderung melakukan diplomasi dalam menciptakan suatu hubungan yang diharapkan akan mengurangi sikap agresif dari masing-masing pihak.

Dalam menganalisa sifat *defensive* dari suatu negara, Kydd memberikan dua kriteria yakni bagaimana kebijakan negara terhadap negara tetangga yang lemah, dan bagaimana kebijakan negara terhadap kontrol militer dan tentaranya. Kriteria yang pertama dapat dijelaskan bahwa suatu negara bersifat *defensive* apabila negara tersebut dapat berusaha untuk mengendalikan diri dan bersedia untuk dikendalikan oleh negara lain. Hal ini dilakukan karena negara tidak mencari atau mengeksploitasi kesempatan untuk melemahkan negara lain. Kriteria yang kedua dapat dijelaskan bahwa negara bersifat *defensive* apabila negara tersebut mengenali adanya *security dilemma* yang ditimbulkan dan memahami implikasinya. Dalam hal ini, negara *defensive* tidak dapat dengan mudah

menghindarinya dengan mengakumulasi kekuatan yang dimilikinya. Negara hanya dapat mencoba untuk mengurangi dampak tersebut dengan jalan kerjasama (Kydd).

Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Tiongkok, teori *defensive realism* dapat digunakan untuk menganalisa tentang bagaimana kecenderungan Tiongkok untuk bertindak dalam merumuskan kebijakan luar negeri sebagai aksi untuk merespon kondisi internasional. Adapun kondisi internasional yang dimaksud dalam hal ini adalah eksistensi AS di Asia Pasifik yang semakin intensif terkait kebijakan *rebalance* yang dirumuskan AS pada tahun 2011.

*Peripheral Diplomacy* adalah upaya strategis negara untuk menjadikan negara-negara *periphery* sebagai *central interest* dari negara tersebut. sebagai kondisi internasional. *peripheral diplomacy* merupakan usaha untuk menjalin dan mewujudkan hubungan antar negara yang bersifat *affinity or amity, sincerity, mutual benefit, dan inclusiveness* (Guangjiang). *Amity* berarti hubungan baik antar negara yang mengacu pada kedekatan geografis dan persahabatan. *Sincerity* mengacu pada model hubungan yang tulus serta upaya dalam mendapatkan kepercayaan mereka. *mutual benefit* mengacu pada gagasan kerjasama yang bermanfaat terhadap area sekitarnya yang menghasilkan kemenangan yang saling menguntungkan. *Inclusiveness* mengacu pada demonstrasi pandangan dari negara *great power* yang bersifat terbuka dan toleran serta kesiapan untuk mencari solusi umum dalam sebuah perbedaan (Guangjiang)

Nicholas Cull mendefinisikan diplomasi sendiri sebagai upaya aktor internasional untuk mengatur lingkungan internasional melalui mekanisme pendek perang, dan keterlibatan dengan aktor internasional yang lain (Cull). Adapun menurut Hans J Morgenthau, diplomasi merupakan alat untuk melakukan hubungan antar negara melalui negosiasi secara damai. Oleh karenanya, diplomasi merupakan alat yang sangat penting dan berguna sebagai sarana bagi Negara-negara untuk mencapai tujuan dalam politik luar negeri negara tersebut (Morgenthau). Secara umum, diplomasi dapat diartikan sebagai metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat asing melalui dialog, negosiasi, dan tindakan singkat lainnya seperti perang atau kekerasan (Freeman. Jr). Menurut sejarah, diplomasi telah dipraktekkan sejak adanya peradaban manusia. Namun, diplomasi modern mulai dipraktekkan pasca *renaissance* Eropa yang kemudian kini telah diadopsi oleh banyak negara di dunia sejak abad 20. Aktor yang terlibat juga tidak terbatas pada negara atau pemerintahan melainkan non pemerintah seperti kelompok atau individu dengan kata lain, aktifitas diplomasi dilakukan oleh multi aktor (Gerauld).

Tujuan diplomasi adalah untuk memperkuat posisi negara, bangsa, atau organisasi dalam kaitannya atau hubungannya dengan negara, bangsa, atau organisasi lain. Dalam hal ini, kegiatan diplomatik ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa menimbulkan resiko dan biaya serta kebencian. Oleh karenanya, masing-masing pihak biasanya berusaha untuk memelihara perdamaian dengan cenderung melakukan langkah negosiasi untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah antar negara dengan cara-cara yang baik demi menjamin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan meski terkadang ancaman koersif kerap dilakukan untuk memaksakan solusi sepihak (Gerauld)

Dalam penelitian ini, konsep *peripheral diplomacy* digunakan untuk menganalisa bentuk kebijakan luar negeri Tiongkok yang bersifat *defensive* sebagai hasil dari komitmen negara untuk menjadikan teori *defensive realism* sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Mengingat kerjasama dan diplomasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh negara untuk berinteraksi dalam sistem internasional sebagai langkah untuk mempertahankan posisi, maka konsep *peripheral diplomacy* relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam menganalisa kebijakan luar negeri Tiongkok.

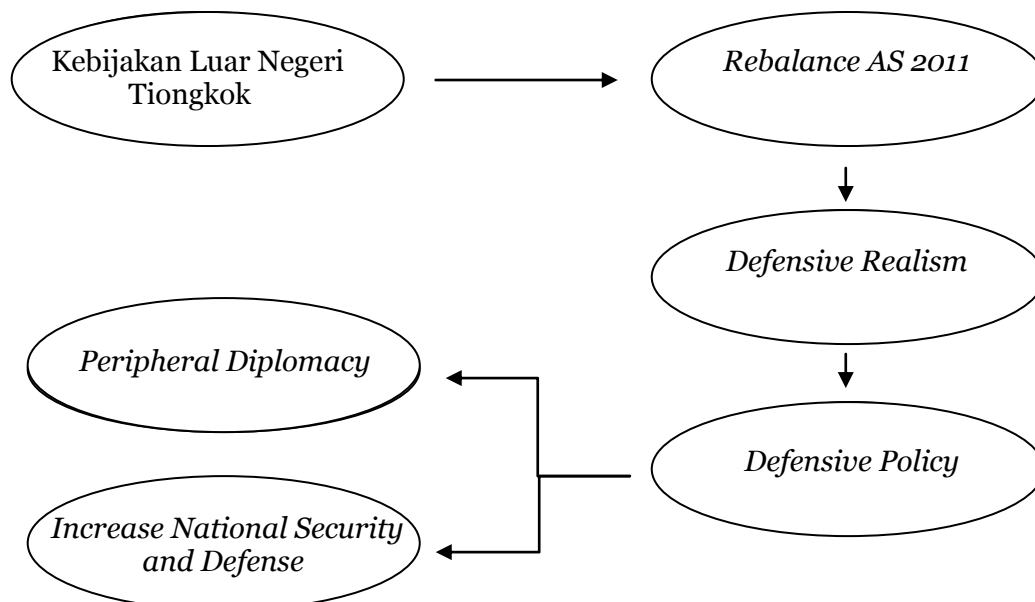
*National security* merupakan sebuah konsep merujuk pada keamanan negara yang menyangkut pertahanan nasional dan hubungan luar negeri. Keamanan nasional merujuk pada usaha pemerintah dalam melindungi negara dari ancaman atau serangan melalui

penyediaan angkatan bersenjata yang memadai. Keamanan nasional yang dilindungi meliputi keamanan ekonomi, keamanan moneter, keamanan energi dan sumber daya alam, keamanan lingkungan, keamanan militer, dan keamanan politik. Secara spesifik, keamanan nasional berarti sebuah keadaan sebagai hasil dari adanya keuntungan militer atau pertahanan setiap bangsa asing atau kelompok negara dan posisi ramah atau pertahanan yang mendorong tindakan bermusuhan atau merusak (US Legal).

Pemerintah negara telah menjadikan *national security* sebagai prioritas utama yang harus dilindungi. Oleh karenanya, langkah awal yang banyak dilakukan oleh negara-negara adalah dengan menciptakan dewan keamanan nasional yang bertugas untuk memastikan dan menentukan pendekatan strategis dengan ketat dalam menganalisa dan meghadapi resiko dan peluang dalam hubungannya dengan dunia internasional. Sedangkan dalam menentukan strategi yang tepat, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yakni prioritas yang ingin dicapai oleh negara, kemampuan yang diperlukan dalam mencapai prioritas tersebut, dan banyaknya sumber daya yang akan dialokasikan. Untuk itu, kekuatan nasional menjadi instrumen yang sangat penting dalam mencegah adanya ancaman yang muncul dan harus diwaspadai (UK Gov).

Mengingat strategi keamanan nasional harus mengkombinasikan antara tujuan yang ingin dicapai, cara yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut, dan kalkulasi sumber daya yang diperlukan, maka diperlukan sebuah peta atau acuan yang jelas. Dengan acuan tersebut, diharapkan dapat membantu menentukan strategi yang tepat dalam mewujudkan keamanan nasional yang terjamin. Adapun salah satu strategi atau cara dalam melindungi *national security* adalah dengan menggunakan kapasitas militer. Militer merupakan salah satu instrumen utama negara yang berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Konsep pertahanan nasional yang menjadikan militer sebagai instrumen utamanya kemudian disebut dengan *national defense* (Acq Notes).

Konsep *national security and defense* dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui langkah Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui instrumen militer. Mengingat teori *defensive realism* menyatakan bahwa *power* yang mana salah satu bentuknya adalah kapabilitas militer merupakan konsep yang penting sebagai alat untuk mempertahankan diri, maka konsep *national security and defense* relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisa kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance AS*.



## **Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Merespon Kebijakan *Rebalance* AS di Asia Pasifik**

Kebijakan luar negeri merupakan ide-ide yang direncanakan oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau menegakkan beberapa perubahan dalam lingkungan yang dapat berupa kebijakan, sikap, atau tindakan terhadap negara atau negara-negara lain. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan salah satu upaya pemerintah negara untuk mencapai *national interest*. Oleh karenanya, dalam proses pembuatan suatu kebijakan luar negeri, dibutuhkan perhitungan sistematis dan matematis yang cermat dan tepat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Valerie Hudson faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri antara lain individu, kelompok, kondisi domestik negara, kondisi internasional, dan atribut nasional (Hudson).

Dalam penelitian ini, fokus utama yang diteliti adalah kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik. Kebijakan *rebalance* AS merupakan upaya AS untuk menjadikan negara-negara di Asia Pasifik sebagai prioritas utama dalam menjalin kerjasama dan melakukan misi diplomatik AS. Kebijakan *rebalance* AS kemudian dipandang Tiongkok sebagai upaya AS untuk membendung kekuatan Tiongkok yang sedang berkembang di kawasan. Kerjasama *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang merupakan salah satu elemen dari kebijakan *rebalance* AS dinilai dapat melemahkan kerjasama Tiongkok dengan negara-negara di Asia. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya *volume* perdagangan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN (Emers). Kehadiran militer AS di Asia Pasifik yang semakin intensif dan masif dianggap Tiongkok sebagai usaha AS dalam mengimbangi kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. hal tersebut dikarenakan usaha AS untuk melakukan latihan militer bersama dengan Korea Selatan dan Filipina (Sindo News).

Kondisi lingkungan internasional yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan *rebalance* AS kemudian mendorong Tiongkok untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi dan melindungi *national interest* Tiongkok. Tiongkok perlu memberikan respon terhadap kebijakan *rebalance* AS yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan Tiongkok di kawasan. Dalam kondisi demikian, diperlukan sebuah kerangka dasar yang menjadi landasan Tiongkok dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang sesuai. Adapun landasan perumusan kebijakan luar negeri Tiongkok yang sesuai dalam kondisi tersebut dapat dianalisa menggunakan teori *defensive realism*. Teori ini merupakan alat untuk menganalisa kecenderungan negara dalam bertindak pada sistem internasional. Menurut teori *defensive realism*, kondisi sistem internasional yang anarki akan mendorong negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan *defensive* atau bertahan. Anarki sendiri menurut Hans J Morgenthau diartikan sebagai kondisi tidak adanya kekuatan supremasi yang berdaulat di dunia global. Kennet Waltz menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua aktor di dunia bersifat setara dan tidak ada yang paling berkuasa (Jackson & Sorenson)

Dalam kasus kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS, teori *defensive realism* terbukti menjadi landasan Tiongkok dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sesuai dengan teori *defensive realism*, Tiongkok kemudian merumuskan kebijakan *defensive* sebagai respon terhadap kebijakan *rebalance* AS dan juga sebagai upaya Tiongkok dalam melindungi *national interest* Tiongkok. Kebijakan-kebijakan *defensive* Tiongkok dapat dilihat dari kebijakan *peripheral diplomacy* Tiongkok dan kebijakan militer Tiongkok.

Kebijakan *peripheral diplomacy* merupakan kebijakan negara untuk menjadikan negara-negara *periphery* sebagai prioritas dalam pelaksanaan diplomasi. Adapun negara *periphery*

menurut Tiongkok secara umum dapat dipahami sebagai negara-negara yang berada di kawasan yang luas yang meliputi negara berkembang dan negara maju. Implikasinya, *peripheral diplomacy* mempunyai beberapa elemen yakni *great power diplomacy*, *developing country diplomacy*, dan *multilateral diplomacy* (Guangjiang & Wang Di). Ciri utama dari *peripheral diplomacy* yang telah disepakati oleh presiden Xi Jinping dan pegawai senior di sebuah forum kerja pada Oktober 2013 adalah bahwa *peripheral diplomacy* merupakan upaya menyampaikan atau mencapai kerukunan atau persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan, dan toleran. Berdasarkan hal tersebut, *peripheral diplomacy* dapat diimplementasikan baik dengan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Dengan Kebijakan *defensive*, Tiongkok berharap dapat melindungi kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok, mempromosikan hubungan persaudaraan dan kerjasama dengan negara-negara lain, bekerja untuk lingkungan internasional dan *periphery* yang lebih baik demi tercapainya reformasi negara, membuka dan melakukan modernisasi, menjaga perdamaian dunia, dan mempromosikan pembangunan umum (White paper China) Tiongkok bersedia menggalang dan mengembangkan hubungan kerjasama bersahabat dengan semua negara atas dasar saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, saling tidak melakukan agresi, saling tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri, dan menjunjung persamaan derajat dan saling menguntungkan. Tiongkok melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara menyeluruh, memegang prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan, mengembangkan hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daerah di dunia untuk mendorong kemakmuran bersama (CRI).

Secara konsisten, Tiongkok menentang hegemonisme, memelihara perdamaian dunia dan berpendirian bahwa semua negara baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah serta miskin maupun kaya merupakan anggota masyarakat internasional yang sama derajat. Persengketaan dan konfrontasi antar negara seharusnya diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan tidak seharusnya menggunakan kekuatan bersenjata atau mengancam dengan kekuatan bersenjata. Negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih apapun (People). Tiongkok akan mendorong pembinaan tata baru politik dan ekonomi internasional yang adil dan rasional sesuai dengan Lima prinsip *peaceful coexistence* yang antara lain: *mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence* (Panda).

Tiongkok mempunyai beberapa kebijakan *defensive* sebagai upaya untuk melindungi keamanan negara dan mempertahankan posisi di kawasan melalui kerangka kebijakan *peripheral diplomacy* dan peningkatan sistem keamanan dan pertahanan negara. Kebijakan *peripheral diplomacy* diimplementasikan oleh Tiongkok dengan meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral seperti kerjasama dengan India, ASEAN, AS dan Rusia serta negara-negara *periphery* yang lain baik berdasarkan kedekatan geostrategis atau geopolitik. Kerjasama Tiongkok dan India diimplementasikan dengan melakukan kerjasama yang efektif di beberapa bidang seperti penanggulangan krisis finansial dan perubahan musim, demokratisasi komunikasi internasional, saling membantu di dunia yang multipolar pada saat ini, dan melindungi hak-hak negara-negara berkembang sebaik mungkin melalui Brazil, Rusia, India and China (BRICS) dan G20 serta beberapa asosiasi yang lainnya. Tiongkok juga telah menjadi mitra dagang utama India yang mana *volume* perdagangan antara kedua negara tersebut terus tumbuh secara cepat. Tiongkok dan India telah berencana untuk meningkatkan perdagangan dari 80 miliar dollar menjadi 100 miliar dollar di tahun 2015. Bisnis Tiongkok telah mempunyai peran yang penting terhadap perbaikan infrastruktur India. Bisnis Tiongkok di bidang elektronik, komunikasi dan metalurgi atau logam juga berada di posisi yang stabil di pasar India (Odintsov).



Pada tahun 2011, Tiongkok dan India berkomitmen melakukan perluasan kerjasama untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin. Perluasan kerjasama antara Tiongkok dan India meliputi kerjasama ekonomi strategis dan kerjasama perdagangan dan investasi (Odintsov). Kerjasama ekonomi strategis antara Tiongkok dan India pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok Wen Jibao saat berkunjung ke India pada Desember 2010. Pasca kunjungan tersebut, pada 26 September 2011, Tiongkok dan India kemudian melakukan dialog pembahasana kerjasama strategis di Beijing Tiongkok. Dalam dialog tersebut kedua negara yakni Tiongkok dan India menyepakati untuk memfokuskan beberapa poin kerjasama antara lain: pertama, *World Economic Situation*. Dalam poin tersebut, Tiongkok dan India berkomitmen untuk terus fokus pada upaya kedua negara dalam pertumbuhan ekonomi domestik yang dapat menyediakan stabilitas terhadap ekonomi global. Kedua, *Respective Domestic Macro-Economic Situation*. Poin ini bertujuan untuk menguatkan komunikasi pada kebijakan makro ekonomi, berbagi pengalaman perkembangan dan meningkatkan koordinasi dalam menganalisa tantangan ekonomi. Ketiga, *Mid and Long-term development Plans*. Poin ini ditujukan untuk saling belajar dari kedua pihak dan melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam merumuskan dan melakukan masing-masing rencana jangka pendek dan panjang.

Pada tahun 2012, Tiongkok dan India melakukan dialog yang membahas tentang kerjasama perdagangan dan investasi yang menghasilkan beberapa poin antara lain: pertama, *Improving Investment Environment*. Poin ini dimaksudkan untuk melakukan pendalaman kerjasama investasi bilateral, pasar terbuka, dan meningkatkan lingkungan investasi di Tiongkok dan India. Kedua, *Infrastructure Cooperation*. Poin ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama di beberapa sektor terutama sektor transportasi kereta api yang berbasis pada hubungan yang saling melengkapi dan saling bermanfaat. Ketiga, *Energy Efficiency and Conservation, and Environmental Protection*. Poin ini bertujuan untuk menguatkan kerjasama pada efisiensi energi dan konservasi serta melindungi lingkungan dan secara aktif meningkatkan kerjasama dalam permasalahan energi termasuk sektor energi terbarukan untuk mempromosikan perkembangan yang berkelanjutan. Keempat, *Water Use efficiency*. Poin ini dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi, mendorong kerjasama bilateral pada konservasi air dan teknologi air bersih. Sedangkan kerjasama perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan India dilakukan dalam beberapa sektor yakni infrastruktur, keuangan dan perbankan, serta pertukaran pendidikan dan promosi bahasa (Odintsov).

Pada tahun 2013, saat presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke India, presiden Xi menyampaikan harapan bahwa Tiongkok dan India dapat secara konsisten meningkatkan hubungan kerjasama strategis yang lebih tinggi. Kunjungan tersebut dilakukan dengan tiga tujuan yang dimaksudkan untuk menguatkan hubungan bilateral dan membangun keseimbangan yang kuat diantara kedua negara yakni Tiongkok dan India seperti yang telah disampaikan oleh presiden Xi Jinping "*We plan to partner with each other to take our strategic and cooperative partnership of peace and prosperity to a higher plane, the two countries should also focus on core areas*" (The Times of India).

Kerjasama ekonomi strategis yang terjalin antara Tiongkok dan India meliputi berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan manufaktur dan pertanian dengan terfokus pada proyek dengan skala yang besar termasuk transportasi kereta api dan taman industri. Sedangkan kerjasama perdagangan dan investasi dilakukan dengan promosi Tiongkok untuk melakukan investasi ke India dan promosi India terhadap minat pebisnis India yang semakin besar terhadap pasar Tiongkok. Kedua negara juga meningkatkan pertukaran budaya dan hubungan kemanusiaan antar bangsa serta terus berusaha untuk mengenyampingkan perbedaan diantara kedua negara untuk memelihara keamanan dan kedamaian di area perbatasan dengan tujuan menyelesaikan isu perbatasan dalam beberapa tahap (Odintsov).

Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan India mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kerjasama yang terjalin antara kedua negara tersebut. peningkatan kerjasama Tiongkok dan India berlangsung sejak tahun 2011 yang mana kedua negara berkomitmen untuk melakukan perluasan kerjasama ekonomi strategis dan kerjasama perdagangan dan investasi. Kerjasama ekonomi strategis dan kerjasama investasi dan perdagangan yang terjalin antara Tiongkok dan India meliputi berbagai bidang seperti kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan manufaktur dan pertanian dengan saling mempromosikan investasi di kedua negara.

Adapun kerjasama Tiongkok dengan ASEAN ditegaskan oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam acara peringatan sepuluh tahun penandatanganan Kesepakatan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif ASEAN-Tiongkok (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*) tahun 2012. Tiongkok telah mendeklarasikan ASEAN sebagai prioritas utama sesuai dengan konsep *good-neighbor (youxian fangxiang)*. Li Keqiang mengatakan:

*“On behalf of the Chinese government, I solemnly declare that China's good-neighborly policy toward the ASEAN is not a matter of expediency, but a long-term strategic option of China. China will firmly prioritize ASEAN member countries in the country's peripheral diplomacy, firmly deepen the strategic partnership with the ASEAN, and firmly cooperate with the ASEAN to jointly safeguard peace and stability in the region, including the South China Sea.”* (China Daily USA).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan Tiongkok untuk memprioritaskan ASEAN bukan hanya sebagai pemanfaatan melainkan opsi strategis Tiongkok dalam jangka panjang. Tiongkok akan bersungguh-sungguh untuk memperdalam hubungan dan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama dalam usaha perlindungan keamanan dan stabilitas kawasan termasuk di laut China Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Tiongkok-ASEAN memprakarsai peningkatan kerjasama pragmatis di bidang ilmu pengetahuan, pelestarian lingkungan, kebudayaan, dan pendidikan. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen dalam pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (ACFTA) yang semakin intensif. Berdasarkan hal tersebut, Hubungan kemitraan strategis antara Tiongkok dan ASEAN diharapkan akan terus mencapai hasil nyata (China Daily USA).

sepanjang tahun 2012, Tiongkok terus memelihara kontak tingkat tinggi dengan negara-negara anggota ASEAN dengan melakukan kunjungan timbal balik tingkat wakil menteri atau tingkat yang lebih tinggi antara kedua pihak sebanyak lebih dari 50 kali. Hal tersebut telah meningkatkan kepercayaan strategis serta komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dalam kerangka Forum Regional ASEAN, Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi menegaskan kebijakan Tiongkok untuk meningkatkan persahabatan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara anggota ASEAN. Untuk meningkatkan hubungan mekanisme Tiongkok dengan ASEAN, Tiongkok mendirikan perwakilan utusan diplomatik untuk ASEAN dengan mengutus Yang Xiuping sebagai Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN. Misi Diplomati Tiongkok untuk ASEAN tersebut diresmikan pada 27 September 2012 (China's Embassy).

Li Keqiang menyampaikan bahwa untuk mempromosikan kemajuan kerjasama Tiongkok-ASEAN, maka Tiongkok mengajukan beberapa proposal antara lain: pertama, menciptakan peningkatan kerjasama *ASEAN Free Trade Area*. Dalam hal ini, Tiongkok berkomitmen untuk bekerjasama dengan ASEAN sebagai mitra utama. Tiongkok akan menandatangani perjanjian perdagangan jangka panjang dengan ASEAN dalam sektor produk pertanian. Tiongkok akan secara aktif memperluas produk impor negara-negara ASEAN yang kompetitif dan menarik di pasaran Tiongkok. Tiongkok juga menargetkan untuk

meningkatkan volume perdagangan hingga 1 triliun dollar AS di tahun 2020 dan meningkatkan investasi bilateral sebesar 150 juta dolar AS selama 8 tahun. Tiongkok juga menyambut baik dan memprioritaskan pengusaha-pengusaha dari negara-negara anggota ASEAN yang ingin menginvestasikan dan memulai bisnis di Tiongkok (China's Embassy).

Kedua, meningkatkan infrastruktur. Tiongkok dan ASEAN perlu untuk mempercepat kerjasama dengan meningkatkan infrastruktur di beberapa area seperti transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi air, transportasi penerbangan, telekomunikasi dan energi. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah usaha untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi secara bertahap. Dalam hal ini, Tiongkok akan berinisiatif untuk menargetkan pinjaman penuh kepada *China-ASEAN Investment Cooperation Fund* dan aktif bekerjasama dengan beberapa pihak dalam membentuk program pendanaan di Asia untuk proyek pembangunan infrastruktur jangka panjang. Sedangkan untuk meningkatkan hubungan, Tiongkok dan ASEAN akan berusaha untuk meningkatkan "*Software Connection*" dalam sistem yang standar seperti bertukar informasi agar tercipta kondisi pembangunan infrastruktur yang saling terhubung secara perlahan. Dalam hal ini, kedua belah pihak yakni Tiongkok dan ASEAN harus meningkatkan kerjasama investasi dan industri dan bersama-sama mengembangkan industri yang efisien untuk mencapai integrasi.

Ketiga, meningkatkan kerjasama keuangan. Menjaga stabilitas ekonomi di kawasan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karenanya, Tiongkok akan berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat keamanan keuangan regional dalam beberapa lapisan, mempromosikan implementasi substansial dari perjanjian *local-currency swap* secara bilateral, mendorong perdagangan lintas batas dan penyelesaian investasi mata uang lokal, memfasilitasi institusi ASEAN untuk berinvestasi di *Chinese bond markets* dan secara konstan memperbaiki mekanisme peringatan dini dan pemberian *bail-out* dalam masalah keuangan regional. Dengan demikian, diharapkan anggota-anggota di kawasan dapat mengatasi berbagai masalah dan tantangan serta dapat bekerjasama dan saling membantu sehingga Tiongkok dan ASEAN dipastikan dapat memelihara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di kawasan.

Keempat, melaksanakan kerjasama maritim. Kerjasama maritim merupakan kunci untuk kedua belah pihak yakni Tiongkok dan ASEAN untuk memperluas kerjasama. Tiongkok telah mengusulkan untuk membentuk "*China-ASEAN maritime partnership*" dan akan mengeluarkan tiga juta Yuan untuk membiayai kerjasama tersebut. Tiongkok akan memprioritaskan upaya untuk membangun basis perikanan, melindungi lingkungan di ekologi maritim, melindungi produksi *seafood* dan perdagangan, menjamin keamanan navigasi dan fasilitas transportasi maritim.

Kelima, mempromosikan pertukaran budaya. Tiongkok berinisiatif untuk menjadikan tahun 2014 sebagai "*China-ASEAN Friendly Exchange Year*". Tiongkok akan menawarkan 15.000 beasiswa pemerintah untuk negara anggota ASEAN dalam tiga sampai empat tahun. Tiongkok juga akan menginvestasikan pendanaan spesial untuk kerjasama regional ASEAN untuk memperdalam hubungan perorangan atau *people to people* dan kerjasama budaya. Dalam hal ini diharapkan generasi muda dari Tiongkok dan ASEAN akan menjadi pemikir dan dapat berpartisipasi dan mempunyai andil yang lebih aktif (China's Embassy).

Selain melakukan peningkatan kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya, Tiongkok juga melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan mendukung penuh terciptanya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan respon dari adanya *Trans Pacific partnership* (TPP) dan juga mendorong implementasi kerjasama tersebut. RCEP merupakan kerjasama ekonomi yang beranggotakan semua negara anggota ASEAN+6 yakni Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan New Zealand. Kerjasama tersebut pertama kali diperbincangkan di ASEAN Summit pada November 2011 yang kemudian diresmikan pada 20 November 2012 (China US Focuss).

Upaya peningkatan diplomasi Tiongkok dengan ASEAN dilakukan dengan meningkatkan kerjasama melalui beberapa kerangka kerjasama seperti *ASEAN Free Trade Area*, *China-ASEAN Investment Cooperation Fund*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership*. melalui kerangka kerjasama tersebut, Tiongkok dapat bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN secara mudah dan intensif. Selain itu, Tiongkok juga kerap melakukan kunjungan kenegaraan kepada negara-negara anggota ASEAN dengan mendirikan perwakilan utusan diplomatik untuk ASEAN dengan mengutus Yang Xiuping sebagai Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN.

Sejak tahun 2012, Tiongkok juga berupaya untuk melakukan diplomasi yang semakin intensif sebagai upaya penguatan posisi Tiongkok di kawasan dan juga mendukung efektifitas kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan. Kebijakan Tiongkok berfokus pada tiga area strategis yakni *new silk road* dengan dengan Asia Tengah, *maritime silk road* dengan Asia Tenggara, dan *economic corridor* melalui India, Myanmar, dan Bangladesh atau yang dikenal dengan konsep *One Belt dan One Road*. *One Belt dan One Road* merupakan proyek sistematis yang akan dibangun bersama-sama melalui konsultasi dan perundingan sehingga dapat mengakomodasi dan memenuhi kepentingan semua pihak dan mengupayakan agar terciptanya integrasi strategi perkembangan dari negara-negara di sepanjang jalur. Untuk mempromosikan implementasi dari inisiatif tersebut, Tiongkok telah membuat garis besar dan mempublikasikan visi dari pembangunan bersama jalur tersebut yakni menanamkan kekuatan dan vitalitas dari jalur sutera kuno, menghubungkan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika menjadi semakin dekat, dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bentuk baru (NDRC People's Republic of China, 2015).

Dengan program tersebut, Tiongkok berambisi untuk mengintegrasikan kekuatan ekonomi dan diplomatik, menghubungkan fasilitas perdagangan, mempromosikan integrasi keuangan, dan mempromosikan program pendidikan budaya antar perorangan di seluruh bangsa Asia, Eropa, dan Afrika. Dalam mengimplementasikan inisiatif *One Belt One Road*, terdapat beberapa kerjasama yang diprioritaskan yang antara lain: pertama, koordinasi kebijakan. Peningkatan koordinasi kebijakan merupakan jaminan penting untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut. Negara-negara di area jalur harus mempromosikan kerjasama antar pemerintah, membangun mekanisme komunikasi dan kebijakan makro antar pemerintah yang multi level, memperluas kepentingan bersama, meningkatkan rasa saling percaya, dan menjangkau consensus kerjasama. Negara-negara di sepanjang jalur akan mengkoordinasikan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi secara penuh, bekerja sesuai rencana dan bertindak untuk kerjasama regional, bernegosiasi untuk menyelesaikan isu-isu kerjasama yang terkait, dan bersama-sama memberikan kebijakan dukungan untuk implementasi dari kerjasama praktis dan jangka panjang.

Kedua, Fasilitas konektivitas. Fasilitas konektivitas merupakan area prioritas untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut. Negara-negara sepanjang jalur diharapkan dapat meningkatkan komunikasi internasional dengan merencanakan pembangunan infrastruktur komunikasi dengan cara membangun kabel optik lintas batas dan membentuk infrastruktur jaringan yang menghubungkan semua sub-daerah di Asia dan antara Asia, Eropa, dan Afrika secara bertahap. Negara-negara juga diharapkan mempromosikan kerjasama untuk membangun infrastruktur transportasi dan juga infrastruktur energi untuk memastikan keamanan pipa gas dan minyak. Namun dengan tetap memperhatikan infrastruktur yang hijau dan rendah karbon.

Ketiga, kerjasama tanpa rintangan. Kerjasama investasi dan perdagangan merupakan tugas utama dalam membangun inisiatif *One Belt One Road*. Negara-negara diharapkan dapat meningkatkan fasilitas investasi dan perdagangan, serta menghapuskan halangan untuk menciptakan lingkungan bisnis di kawasan dan di semua negara yang terkait. Keempat, integrasi finansial. Integrasi finansial merupakan pondasi penting untuk mengimplementasikan inisiatif *One Belt One Road*. Negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kerjasama keuangan dan lebih berusaha dalam membangun stabilitas mata

uang. Negara-negara diharapkan dapat meningkatkan pasar di Asia dan bersama-sama berupaya untuk menciptakan *Infrastructure Investment Bank* dan *BRICS New Development Bank*. Kelima, hubungan antar perorangan. Hubungan antar perorangan memberikan dukungan publik untuk mengimplementasikan inisiatif. Negara-negara diharapkan meneruskan semangat kerjasama yang ramah dengan mempromosikan budaya dan pertukaran pelajar, kerjasama media, pertukaran pemuda, wanita, dan jasa sukarelawan sehingga dapat menarik dukungan publik untuk memperdalam kerjasama multilateral (Chaudury, 2015).

Dalam mendorong inisiatif *One Belt One Road* dan meningkatkan kerjasama regional, Tiongkok akan mengambil manfaat dari mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral yang ada. Negara-negara diharapkan dapat memperkuat kerjasama bilateral dan mempromosikan pembangunan yang komprehensif dari hubungan bilateral melalui komunikasi dan konsultasi multi level dan multi channel. Negara-negara akan mendorong penandatanganan MOU atau rencana kerjasama. Negara-negara juga diharapkan untuk meningkatkan peran mekanisme kerjasama multilateral. Menggunakan mekanisme yang sudah ada seperti *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *ASEAN Plus China (10+1)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, *Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA)*, *China-Arab States Cooperation Forum (CASCF)*, *China-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue*, *Greater Mekong Sub-region (GMS) Economic Cooperation*, dan *Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC)* untuk memperkuat komunikasi antar negara dan menarik negara-negara dan wilayah yang lain untuk berpartisipasi dalam inisiatif *One Belt One Road* (Chaudury, 2015).

Adapun kerjasama yang terjalin antara Tiongkok-AS dan Tiongkok-Rusia dapat dilihat dari konsep *New Model of Great Power Relations*. Konsep tersebut berarti hubungan yang bersifat saling memahami dan saling percaya, menghormati kepentingan satu sama lain, kerjasama yang saling menguntungkan, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam urusan internasional dan isu global. Konsep tersebut merupakan kebijakan Tiongkok untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berkekuatan besar seperti AS dan Rusia (Lampton). Konsep *New Model of Great Power Relations* pertama kali diimplementasikan antara Tiongkok dan Rusia pada Maret 2013. Kebijakan tersebut ditujukan untuk *Accept multipolarity, Acknowledge spheres of influence, Defer to UN authority, Accommodate core interests. Enhance cooperation, Adhere to a "New Security Concept" (NSC)*. Dalam poin *Accept Multipolarity*, Tiongkok-Rusia mempromosikan pernyataan bahwa dunia yang multipolar ditujukan untuk memfasilitasi distribusi kekuatan di dunia global. (Uni Eropa, BRICS, dan ASEAN) sebagai kekuatan geografis yang diorientasikan dalam sistem internasional akan menghilangkan hegemoni AS.

Sejak tahun 2013, kedua negara yakni Tiongkok dan AS dengan serius berupaya untuk menjalin hubungan bilateral yang baik. Pada Juni 2013, Xi dan Obama mengadakan pertemuan tidak resmi di Sunnylands California. Dalam pertemuan tidak resmi tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan penerapan kebijakan *New Model of Great Power Relations* yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kedua negara dalam berhubungan. Dalam kebijakan interaksi baru tersebut, kedua negara bersepakat untuk saling menghormati dan menghindari konflik. Mengingat dalam sejarah, konflik cenderung terjadi ketika terdapat kekuatan baru yang muncul. Kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di era globalisasi ekonomi saat ini (Cheng Li).

Konsep tersebut dilandasi atas harapan Xi terhadap hubungan Tiongkok-AS yakni *no conflict, no confrontation, mutual respect, win-win collaboration*. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Xi kemudian mengajukan beberapa rekomendasi antara lain: mempromosikan dialog dalam level yang baru, memulai dimensi baru dari kerjasama pragmatis, menciptakan model baru kerjasama kekuatan besar, mencari cara baru dalam

mengatur perbedaan, dan semangat bekerja dalam mendirikan model baru hubungan Tiongkok-AS dalam bidang militer. Menurut Wang Yizhou, pemimpin Tiongkok memahami bahwa hubungan Tiongkok-AS merupakan hubungan bilateral yang sangat penting dan juga hubungan yang dapat membawa tantangan besar terhadap perkembangan Tiongkok (Yizhou). *The New Model of Great Power Relations* merupakan konsep yang mengatur hubungan Tiongkok dengan negara-negara besar seperti Rusia dan AS. Konsep tersebut mencerminkan diplomasi Tiongkok dengan Rusia dan AS dengan tujuan sebagai acuan dalam berhubungan. Tiongkok berupaya untuk menjalin hubungan dengan Rusia dan AS dengan baik dan menjalankan diplomasi damai dengan tidak melakukan agresifitas militer.

Dalam kebijakan tersebut, terlihat jelas bahwa Tiongkok akan mengecam AS jika AS berniat untuk membendung kekuatan Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok mengajak AS untuk menjalin hubungan yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, tidak berkonflik, tidak berkonfrontasi, dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Berbeda dengan kerangka kebijakan *New Model of Great Power Relations* yang terjalin antara Tiongkok dan Rusia. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antara Tiongkok dan Rusia yang lebih bersifat ekonomis dengan mempererat kerjasama diantara kedua belah pihak demi tercapainya keuntungan ekonomi yang saling menguntungkan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Langkah Tiongkok untuk mengajak AS dalam berkomitmen menjalin hubungan yang damai dapat dijelaskan sebagai implikasi dari kekhawatiran Tiongkok terhadap agresifitas AS melalui alokasi militer AS yang besar di kawasan Asia Pasifik.

Respon Tiongkok terhadap kebijakan *rebalance* AS tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan diplomasi terhadap negara-negara *periphery* saja. Langkah penting yang dilakukan Tiongkok untuk melindungi keamanan nasional negara adalah dengan membentuk sistem keamanan dan pertahanan yang kuat melalui instrumen militer. Militer yang merupakan instrumen terpenting dalam pertahanan negara kemudian mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi militer sebagai upaya penguatan militer dan angkatan bersenjata. Restrukturisasi militer Tiongkok dilakukan oleh Presiden Xi Jinping dengan membentuk Komisi Keamanan Negara pada pertengahan November 2014. Lembaga yang menyerupai Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat itu menjamin pengawasan penuh pemerintah terhadap militer dan mempererat sinergi antara angkatan bersenjata, dan dinas rahasia di dalam dan luar negeri dan juga dengan menggabungkan komisi militer dari tujuh menjadi lima (Setiawan, 2014). Hal ini dilakukan dengan tujuan menguatkan pasukan dan meningkatkan kesiapsiagaan tentara militer dalam beberapa fokus yang paling penting yakni respon terhadap ancaman dari luar. Tiongkok juga semakin intensif dalam melakukan modernisasi militer dengan mengalokasikan dana yang besar.

Selain itu, pembentukan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di laut China Timur dan laut China Tengah juga merupakan upaya Tiongkok dalam meningkatkan sistem pertahanan melalui udara. ADIZ merupakan kebijakan negara untuk mengidentifikasi lokasi dan pengendalian terhadap pesawat udara sipil yang diberlakukan oleh negara di zona tertentu. Pada tanggal 23 November 2013, Tiongkok mendeklarasikan wilayah *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang meliputi 2/3 dari laut China Timur. Tiongkok merumuskan ADIZ sebagai rencana aksi darurat militer sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tiongkok "*China's armed forces will adopt defensive emergency measures to respond to aircraft that do not cooperate in the identification or refuse to follow the instructions*" (Bautista). Implementasi ADIZ di Tiongkok ditargetkan untuk mengidentifikasi beberapa hal yakni pertama, identifikasi rencana Penerbangan. Pesawat yang terbang di wilayah ADIZ Tiongkok di laut China Timur harus melaporkan rencana penerbangan ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok atau *Civil Aviation Administration of China*. Kedua, Identifikasi Radio. Pesawat yang terbang di wilayah ADIZ Tiongkok di Laut China Timur harus menjaga komunikasi radio dua arah, dan menanggapi secara tepat waktu dan akurat untuk penyelidikan identifikasi dari organ ADIZ atau unit disahkan oleh

organ. Ketiga, Identifikasi Transponder. Pesawat yang terbang di wilayah ADIZ Tiongkok jika dilengkapi dengan transponder radar sekunder, harus menjaga transponder bekerja di seluruh kursus. Keempat, identifikasi Logo. Pesawat yang terbang di wilayah ADIZ Tiongkok harus jelas memberikan tanda kebangsaan dan logo identifikasi pendaftaran sesuai dengan perjanjian internasional yang terkait (Xinhua, 2013).

Adanya ADIZ sebagai upaya Tiongkok untuk mempertahankan status quo di kawasan laut China Timur dan laut China Tengah selain dikarenakan terjadinya eskalasi konflik dengan Korea dan Jepang juga dikarenakan hadirnya militer AS yang semakin besar. Oleh karenanya, Tiongkok perlu untuk mengupayakan sistem pertahanan yang kuat demi tercapainya keamanan nasional negara dan juga demi mempertahankan posisi Tiongkok sebagai kekuatan regional.

### **Sifat *Defensive* Kebijakan Luar Negeri Tiongkok**

Menurut Kydd, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dikatakan bersifat *defensive* apabila memenuhi minimal dua kriteria yakni bagaimana kebijakan negara terhadap negara tetangga yang lemah, dan bagaimana kebijakan negara terhadap kontrol militer dan tentaranya. Kriteria yang pertama dapat dijelaskan bahwa suatu negara bersifat *defensive* apabila negara tersebut berusaha untuk mengendalikan diri dan bersedia untuk dikendalikan oleh negara lain. Hal ini dilakukan karena negara tidak mencari atau mengeksploitasi kesempatan untuk melemahkan negara lain. Kriteria yang kedua dapat dijelaskan bahwa negara bersifat *defensive* apabila negara tersebut mengenali adanya *security dilemma* yang ditimbulkan dan memahami implikasinya. Dalam hal ini, negara *defensive* tidak dapat dengan mudah menghindarinya dengan mengakumulasi kekuatan yang dimilikinya. Negara hanya dapat mencoba untuk mengurangi dampak tersebut dengan jalan kerjasama (Kydd).

Kebijakan *peripheral diplomacy* Tiongkok mengindikasikan bahwa Tiongkok berusaha untuk bekerjasama dengan negara lain untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Tiongkok berkomitmen untuk membantu perkembangan negara-negara mitra strategisnya baik dengan menyediakan kesempatan investasi di Tiongkok maupun melakukan investasi di negara lain. Hal ini terbukti dengan terbukanya pasar Tiongkok bagi produk-produk luar yang kompetitif dan juga adanya program beasiswa yang diberikan oleh Tiongkok melalui program *exchange youth*.

Tiongkok juga banyak menginvestasikan dana yang cukup besar di *China-ASEAN Fund* sebagai langkah untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN. Tiongkok berperan aktif dalam kerjasama ASEAN dan bersedia untuk menghormati serta mendukung kebijakan pemimpin ASEAN. Tiongkok telah menjadi pemimpin dalam upaya pembangunan kawasan yang stabil dan memelihara hubungan internasional berdasarkan prinsip *peaceful coexistence*. Hal tersebut mengesankan bahwa Tiongkok tidak bertindak sebagai negara yang mengendalikan negara lain melainkan sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Artinya, Tiongkok bersedia untuk mengendalikan dan dikendalikan oleh negara lain. Tiongkok tidak berusaha untuk melemahkan kekuatan negara lain bahkan membantu perkembangan negara lain.

Dalam hal militer, Tiongkok mengadopsi kebijakan militer *defensive*. Kebijakan militer yang *defensive* dibuktikan dengan prinsip militer yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang berorientasi terhadap pertahanan negara dan bukan perluasan wilayah atau ekspansionis. Tiongkok menyatakan bahwa militer Tiongkok merupakan alat negara yang berfungsi untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negara. Tiongkok telah melakukan upaya peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara sebagai langkah untuk melindungi kedaulatan negara. Tiongkok tidak berusaha memaksimalkan kekuatan yang kemudian ditujukan untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Dalam hal modernisasi

militer, Tiongkok menjelaskan bahwa hal tersebut diperlukan seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok.

Kebijakan *New Model of Great Power Relations* antara Tiongkok dan AS menyiratkan bahwa Tiongkok mengkampanyekan pola hubungan yang rukun. Tiongkok menegaskan kepada AS untuk dapat saling menghormati kepentingan dan kedaulatan masing-masing pihak. Kebijakan tersebut didasarkan atas kekhawatiran Tiongkok terhadap ancaman AS di Asia Pasifik melalui kerangka kebijakan *rebalance*. Melalui konsep *New Model of Great Power Relations*, Tiongkok meminta AS untuk tidak melakukan intervensi terhadap isu-isu regional mengingat kapasitas militer AS di Asia Pasifik yang semakin besar. Tiongkok mencurigai bahwa kebijakan *rebalance* dan peningkatan eksistensi militer AS di Asia Pasifik ditujukan untuk membendung kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan. Tiongkok kemudian merespon dengan meningkatkan kapabilitas militer Tiongkok yang salah satunya dengan membuat kebijakan ADIZ. Dalam hal ini, Tiongkok menyadari akan timbulnya *security dilemma* apabila Tiongkok yang merupakan negara yang berpengaruh di kawasan dan AS yang merupakan negara *super power*, masing-masing meningkatkan kapasitas kekuatan. Implikasinya, kondisi demikian akan berdampak negatif terhadap hubungan Tiongkok-AS. Untuk itu, Tiongkok perlu membuat Konsep *New Model of Great Power Relations* sebagai kerangka yang mengatur hubungan kedua pihak agar tercipta tatanan masyarakat dan lingkungan yang aman.

Berdasarkan bentuk kebijakan Tiongkok dan implementasinya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik bersifat *defensive*. Hal tersebut dapat dinilai dengan analisis bahwa kebijakan-kebijakan Tiongkok telah memenuhi dua kriteria yang diajukan oleh Kydd sebagai syarat atau ciri dari kebijakan *defensive*. Kebijakan *peripheral diplomacy* telah memenuhi syarat yang pertama yakni perlakuan yang baik oleh Tiongkok terhadap negara yang lemah. Sedangkan kebijakan pertahanan militer Tiongkok yang *defensive* dan tidak agresif telah memenuhi syarat kedua.



## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik tahun 2011. Jawaban sementara yang diberikan oleh penulis adalah bahwa kebijakan Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik tahun 2011 dianalisa dengan menggunakan teori *defensive realism* yakni bersifat *defensive*. kebijakan *defensive* tersebut dapat diimplementasikan melalui dua hal yakni inisiatif untuk melakukan *peripheral diplomacy* dan meningkatkan keamanan dan pertahanan negara.

Berdasarkan teori *defensive realism*, sistem internasional yang anarki menjadikan suatu negara untuk bertindak *defensive*, untuk menanggapi sistem internasional yang dinilai dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional, negara akan memutuskan untuk mengadopsi strategi bertahan. Strategi tersebut, dapat diimplementasikan dengan menjalin diplomasi yang baik dengan negara-negara *periphery* dan dengan meningkatkan sistem keamanan dan pertahanan. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman yang tidak diinginkan. Dalam logika *defensive*, negara akan terus berhubungan dengan dunia secara damai sepanjang kepentingan inti negara tetap terlindungi.

Kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik dipandang Tiongkok sebagai upaya AS untuk membendung kekuatan Tiongkok di kawasan. Persepsi tersebut didapatkan dari opini publik yang menyatakan bahwa hubungan Tiongkok-AS sebagai musuh telah meningkat dari 8 persen di tahun 2010 menjadi 26 persen di tahun 2012. Persepsi Tiongkok bahwa AS bertujuan untuk membendung kekuatan Tiongkok kemudian mendorong Tiongkok untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung Tiongkok untuk mempertahankan posisinya di kawasan.

Berdasarkan teori dan data yang disajikan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diberikan oleh penulis terbukti benar. Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan *rebalance* AS di Asia Pasifik tahun 2011 adalah dengan merumuskan kebijakan-kebijakan *defensive*. kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan *peripheral diplomacy* dan kebijakan peningkatan keamanan dan pertahanan negara Tiongkok.

Kebijakan *peripheral diplomacy* Tiongkok diimplementasikan dengan menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral seperti kerjasama Tiongkok-India dan kerjasama Tiongkok ASEAN. Selain itu, Tiongkok juga berinisiatif membangun *New Silk Economic Road* dan *21<sup>st</sup> Maritime Silk Road (One Belt and One Road)* sebagai upaya meningkatkan kerjasama dan diplomasi Tiongkok dengan negara-negara di Asia Pasifik. Tiongkok juga menciptakan *The New Model of Great Power Relations* sebagai langkah diplomasi Tiongkok terhadap AS untuk saling menghormati kepentingan masing-masing.

Adapun kebijakan peningkatan keamanan dan pertahanan Tiongkok diimplementasikan dengan merumuskan strategi pertahanan yang sesuai. Strategi pertahanan yang diadopsi oleh Tiongkok adalah strategi pertahanan *defensive*. Tiongkok berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan pertahanan dengan melakukan modernisasi militer dan restrukturisasi militer sebagai upaya pencapaian operasi militer yang semakin efektif. Selain itu, Tiongkok juga mengadopsi kebijakan *Air Defense Identification Zone* sebagai upaya Tiongkok untuk menegaskan sikap

dalam menjaga hak atas wilayah laut. Dengan adanya kebijakan ADIZ Tiongkok berharap dapat mengidentifikasi musuh secara dini dan juga dapat melindungi wilayah teritori laut Tiongkok.

Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon kebijakan rebalance AS di Asia Pasifik tersebut dapat dikatakan bersifat *defensive*. Hal ini dapat terbukti bahwa kebijakan Tiongkok telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Kydd sebagai negara yang *defensive*. Syarat tersebut yakni perlakuan negara terhadap negara lemah yang baik dan militer negara yang tidak agresif. Dalam hal ini, kebijakan *peripheral diplomacy* Tiongkok telah memenuhi syarat yang pertama sedangkan kebijakan pertahanan militer Tiongkok yang *defensive* dan tidak agresif telah memenuhi syarat kedua.

## REFERENSI

### Situs Resmi Publikasi Pemerintah

China's Embassy. 2012. *China-ASEAN Cooperation in 2012*. Embassy of The People's Republic of China in Malaysia. [online] at <http://my.chineseembassy.org/eng/zgxw/t990453.htm> accessed on 06 May 2015

National Development and Reform Commission (NDRC) People's Republic of China. 2015. *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*. [online] at [http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html) accessed on 21 May 2015

The White House. *Remarks by President Obama to the Australian Parliament*. [online] at <http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament> accessed on 10 Oct 2014

US Gov. *Strategic Guidance—United States Department of Defense*. [online] at [http://www.defense.gov/news/Defense\\_Strategic\\_Guidance.pdf](http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf) accessed on 26 Feb 2015

US. Gov. *Sustaining U.S Global Leadership: Priorities for the 21<sup>st</sup> Century Defense, U.S Department of Defense*. 2012. [online] at [www.defense.gov/news/Defense\\_Strategic\\_Guidance.pdf](http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf) accessed on 27 Feb 2015

Xinhua. 2013. *Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.C.* [online] at [http://eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content\\_4476143.htm](http://eng.mod.gov.cn/Press/2013-11/23/content_4476143.htm) accessed on 23 May 2015

### Artikel Jurnal Online

Bautista, Lowell. 2013. *Complicating the Complex: China's ADIZ*. [online] at <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2036&context=lhapapers> accessed on 22 My 2015

- Chaudury, Dipanjan Roy. 2015. *Indo-China Joint Silk Road Economic Belt & Maritime Silk Road: China Seeks to Address Misgivings*. [online] at <http://economictimes.indiatimes.com/news/defense/indo-china-joint-silk-road-economic-belt-maritime-silk-road-china-seeks-to-address-misgivings/articleshow/46860971.cms> accessed on 21 May 2015
- Currie, Kelley on Natalie Liu. *China Sees Threat in US Pivot to Asia*. [online] at <http://www.voanews.com/content/china-sees-threat-in-us-pivot-to-asia/1677768.html> accessed on 28 Feb 2015
- Emers, Ralf. *The US Rebalancing Strategy: Impact on The South China Sea*. [online] at <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-8.pdf> accessed on 27 Mar 2015
- Haddad, Mona. *Trade Integration in East Asia: The Role of China and Production Networks*. [online] at <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7185/wps4160.pdf?sequence=1> retrieved on 28 Feb 2015
- Ikenberry, G. Jhon. *The Rise of China and the Future of the West, Can the Liberal System Survive?*. [online] at <http://www.foreignaffairs.com/articles/63042/g-john-ikenberry/the-rise-of-china-and-the-future-of-the-west> accessed on 13 Nov 2014
- Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press
- Lampton, David M.. *A New type of major-Power Relations: Seeking a Durable Foundation for U.S.-China Ties*. [online] at <http://www.nbr.org/publications/element.aspx?id=650> accessed on 18 May 2015
- Lieberthal, Kenneth and Jisi, Wang. *Addressing U.S. - China Strategic Distrust on Ely Ratner. Rebalancing to Asia with an Insecure China* [online] at [http://csis.org/files/publication/TWQ\\_13Spring\\_Ratner.pdf](http://csis.org/files/publication/TWQ_13Spring_Ratner.pdf) accessed on 23 Oct 2014
- Li, Cheng. *A New Type of Major Power Relations*. [online] at <http://www.brookings.edu/research/interviews/2014/09/26-new-type-power-Relations-li> accessed on 18 May 2015
- Nn, 2012. *Ratings for the U.S. Decline: Growing Concerns in China about Inequality, Corruption*. Pew Research Center. Pew Global Attitudes Project. [online] at <http://www.pewglobal.org/2012/10/16/growing-/concerns-/in-/china-/about-/inequality-/corruption> accessed on 23 Oct 2014
- Odintsov, Vladimir. *China and India: Strategic Partnership and Cooperation*. [online] at <http://journal-neo.org/2014/07/10/rus-kitaj-i-indiya-strategicheskoe-partnerstvo-i-sotrudnichestvo/> accessed on 18 May 2015
- Panda, Ankit. *Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later*. [online] at <http://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/> accessed on 24 May 2015

Shambaugh, David. *Facing Reality in China Policy*. [online] at <http://www.foreignaffairs.com/articles/56655/david-shambaugh/facing-reality-in-china-policy> accessed on 28 Feb 2015

Sutter, Robert G. et. al. *Balancing Acts: The U.S Rebalance and Asia-Pacific Stability*. [online] at [http://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/BalancingActs\\_Compiled1.pdf](http://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/BalancingActs_Compiled1.pdf) accessed on 28 Feb 2015

Szczudlik-Tatar, Justyna. *China's Response to the United States' Asia-Pacific Strategy*. [online] at [https://www.pism.pl/files/?id\\_plik=12076](https://www.pism.pl/files/?id_plik=12076) accessed on 27 Feb 2015

Terada, Takashi. *The Sino-American Rivalry and The Future of The Asia Pacific Trade Architecture*. [online] at [http://www.studentpulse.com/articles/962/the-sino-american-rivalry-and-the-future-of-the-asia-pacific-trade-architecture?utm\\_expid=22625156-1.JXOwidWBT9qABIV2oA58RQ.o&utm\\_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D10%26ved%3D0CGAQFjAJ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.studentpulse.com%252Farticles%252F962%252Fthe-sino-american-rivalry-and-the-future-of-the-asia-pacific-trade-architecture%26ei%3DjJIUVZ1fg6m5BMqGgtgO%26usg%3DAFQjCNF2iEegynpTHVFSOyjOYRqoqsmQEQ%26sig2%3D1-ucA2n2bvt6NndZKLZ3hg](http://www.studentpulse.com/articles/962/the-sino-american-rivalry-and-the-future-of-the-asia-pacific-trade-architecture?utm_expid=22625156-1.JXOwidWBT9qABIV2oA58RQ.o&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D10%26ved%3D0CGAQFjAJ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.studentpulse.com%252Farticles%252F962%252Fthe-sino-american-rivalry-and-the-future-of-the-asia-pacific-trade-architecture%26ei%3DjJIUVZ1fg6m5BMqGgtgO%26usg%3DAFQjCNF2iEegynpTHVFSOyjOYRqoqsmQEQ%26sig2%3D1-ucA2n2bvt6NndZKLZ3hg) accessed on 27 Mar 2015

Xuetong, Yan. 2014. *China's New Foreign Policy: Not Conflict but Convergence of Interest*. World Post [online] at [http://www.huffingtonpost.com/yan-xuetong/chinas-new-foreign-policy\\_b\\_4679425.html](http://www.huffingtonpost.com/yan-xuetong/chinas-new-foreign-policy_b_4679425.html) accessed on 24 May 2015

Yizhou, Wang. *China's New Foreign Policy: Transformations and Challenges reflected in Changing Discourse*. [online] at <http://www.theasanforum.org/chinas-new-foreign-policy-transformations-and-challenges-reflected-in-changing-discourse/> accessed on 20 May 2015

## **Berita Online**

BBC News. *China's Economy Grew 10,3% in 2010*. [online] at <http://www.bbc.com/news/business-12235625> accessed on Feb 2015

China Daily USA. *Time for Harvest and Sowing for Future*. [online] at [http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-09/05/content\\_16945131.htm](http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-09/05/content_16945131.htm) accessed on 05 May 2015

China US Focus. *Developments and Prospects of The RCEP*. [online] at <http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/developments-and-prospects-of-the-rcep/> accessed on 18 May 2015

CRI. *Politik Luar Negeri Tiongkok*. [online] at <http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40201.htm> accessed on 23 May 2015

Okezone. 2010. *China Perkuat Kekuatan Militer*. [online] at <http://news.okezone.com/read/2010/08/18/18/3639> accessed on 28 Feb 2015

People. *About China*. [online] at <http://en.people.cn/92824/92845/92870/> accessed on 24 May 2015

Sindo News. 2014. *Korsel & AS Lanjutkan Latihan Militer Bersama*. [online] at <http://international.sindonews.com/read/852715/40/korsel-as-lanjutkan-latihan-militer-bersama-1397119871> accessed on 24 May 2015

The Times of India. *China, India Should Take Strategic Partnership to Higher Plane: Xi Jinping*. [online] at <http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-India-should-take-strategic-partnership-to-higher-plane-Xi-Jinping/articleshow/42786322.cms> accessed on 17 May 2015

ADB, 2013. *Asian Development Bank*. [Online]  
Available at: [www.adb.org](http://www.adb.org) [Accessed 9 January 2015].